

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Hadirnya era globalisasi dalam hubungan internasional semakin memudahkan interaksi antarnegara. Mudahnya interaksi tersebut menjadikan lingkungan internasional seolah berubah menjadi lingkungan kecil tanpa batas, sehingga negara bisa memanfaatkannya untuk menunjang kesepakatan dan tujuan yang sesuai dengan kepentingan nasionalnya. Meningkatnya hubungan internasional sebagai pengaruh dari globalisasi ini juga menciptakan interdependensi antarnegara semakin meningkat, sehingga perlu hubungan yang intens untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, suatu negara perlu melakukan interaksi dengan negara lain dalam bentuk kerja sama bilateral.

Kerja sama bilateral merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh negara untuk dapat memenuhi kepentingan nasional. Hal ini didasari oleh kesadaran bahwa negara sejatinya tidak dapat berdiri sendiri dan memerlukan bantuan dari negara lain karena setiap negara memiliki perbedaan potensi sumber daya dan keterbatasan dalam memanfaatkan sumber dayanya (Avivi & Siagian, 2020). Pada pelaksanaannya, kerja sama bilateral tidak hanya bertumpu pada aktor negara saja melainkan juga terdapat keterlibatan aktor lain seperti keterlibatan para pengusaha sehingga bentuk kerja sama yang dilakukan adalah antara pemerintah dengan pelaku usaha tersebut. Selain itu, kerja sama bilateral ini juga dinilai sebagai bentuk kerja sama yang paling efektif. Sampai dengan April 2019, telah terjalin 162 kerja sama bilateral antara Indonesia dengan negara lain. Negara mitra yang bekerja sama dengan Indonesia ini terbagi menjadi delapan kawasan, yaitu Afrika, Timur Tengah, Asia Timur dan Asia Pasifik, Asia Selatan dan Asia Tengah, Amerika Utara dan Amerika Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, Eropa Barat dan Eropa Tengah dan Eropa Timur (Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2019).

Jepang merupakan negara mitra yang berada di kawasan Asia Timur. Jepang juga dikenal sebagai negara yang memiliki peran penting di lingkup internasional. Sebabnya, Jepang aktif terlibat dalam berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dan kemakmuran di dunia. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana Jepang sebagai negara maju yang memiliki kekuatan ekonomi terutama dalam bidang industri manufaktur kerap memberikan bantuan dan bersedia untuk menjadi mitra dagang bagi negara berkembang supaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di negara tersebut.

Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Jepang telah terjalin sejak lama. Pada tanggal 20 bulan Januari 1958, kedua negara ini sepakat untuk menandatangani perjanjian damai antara Indonesia dan Jepang dengan harapan dapat memberikan manfaat bagi kedua negara di masa depan (Seniwati, Ranti, Guntur, & Badiu, 2021). Setelah adanya kesepakatan tersebut, banyak kerja sama bilateral yang dilakukan dalam berbagai sektor seperti ekonomi, kebudayaan, sosial, dan keamanan. Lewat kerja sama bilateral, sektor ekonomi menjadi sektor yang paling merasakan dampaknya karena Jepang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam bentuk bantuan, investasi, dan perdagangan.

Bentuk upaya pemerintah Indonesia dengan negara Jepang untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi kedua negara adalah dengan melakukan kerja sama melalui IJEPA (*Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement*). Perjanjian IJEPA ditandatangani oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe pada tanggal 20 Agustus 2007 di Jakarta (Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, 2021). IJEPA kemudian disahkan melalui Perpres No. 36 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008 Tentang Pengesahan *Agreement Between the Republic of Indonesia and Japan for an Economic Partnership* (Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi) dan menjadi kerja sama perdagangan secara bilateral

pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia (Budiarti & Hastiadi, 2015).

Pembentukan IJEPA pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan arus perdagangan antara Indonesia dan Jepang. Namun demikian, menyadari bahwa perjanjian kerja sama ini melibatkan dua negara dengan kekuatan ekonomi yang tidak seimbang justru hanya akan memberikan manfaat yang tidak seimbang juga bagi kedua belah pihak. Hal ini merupakan kondisi *win-lose* yang mengancam keberlanjutan kerja sama tersebut dalam jangka panjang. Maka dari itu, perjanjian IJEPA dilandasi oleh tiga pilar utama yang bertujuan untuk memperoleh keseimbangan manfaat bagi Indonesia dan Jepang. Tiga pilar tersebut meliputi *Liberalization* (pembukaan akses pasar), *Facilitation* (pasar yang terbuka/dipermudah), dan *Cooperation* (kerja sama untuk peningkatan kapasitas). Dari ketiga pilar yang ada, pilar *Cooperation* merupakan pilar yang paling strategis untuk perekonomian Indonesia karena ditujukan untuk meningkatkan kapasitas industri manufaktur di Indonesia agar dapat menghasilkan produk-produk yang sesuai dengan kriteria pasar Jepang yang telah dibuka dua pilar lainnya sehingga akan memperoleh persyaratan dari pasar global karena telah berganti menjadi kesepakatan yang bersifat *win-win condition*.

Kekuatan ekonomi yang timpang dari Indonesia bisa terlihat dari industri manufakturnya yang masih memiliki kelemahan dalam mendorong nilai produktivitasnya. Kelemahan industri manufaktur di Indonesia yang menjadi hambatan bagi Indonesia untuk meningkatkan daya saing nasional merupakan permasalahan internal. Permasalahan tersebut meliputi beberapa bidang, seperti pengembangan teknologi, ketersediaan infrastruktur, kualitas pelayanan publik, dan persoalan mengenai sumber daya manusia (SDM) (Atmawinata, et al., 2008). Maka dari itu, untuk merealisasikan pilar *Cooperation* yang terdapat dalam kesepakatan IJEPA, Jepang memberikan program khusus bernama MIDEK (*Manufacturing Industry Development Center*) guna meningkatkan daya saing manufaktur Indonesia. Berdasarakan dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor: 77/M-

IND/PER/9/2007 pada tanggal 27 September 2007 mengenai pembentukan Tim Implementasi IJEPA Bidang Industri, MIDEDEC mengemban dua tugas utama, yaitu:

1. Melaksanakan hasil kesepakatan serta kerja sama ekonomi antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Jepang dalam bidang pengembangan industri manufaktur, dan
2. Mengarahkan pelaksanaan kegiatan kerja sama sesuai dengan sub bidang yang meliputi perencanaan, implementasi, *monitoring*, dan evaluasi secara berkelanjutan

MIDEDEC sendiri sebenarnya merupakan bentuk kompensasi yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia karena telah memberikan fasilitas pengurangan tarif untuk produk-produk impor Jepang dalam program USDFS (*User Specific Duty-Free Scheme*). MIDEDEC berperan sebagai motor dalam pembangunan kapasitas industri di Indonesia. Oleh karena itu, MIDEDEC perlu melakukan kegiatan-kegiatan yang bisa meningkatkan mutu produk/jasa yang dihasilkan oleh industri di Indonesia supaya sesuai dengan kriteria pasar Jepang. Kegiatan tersebut meliputi: Studi Dasar (*Basic Study*), Pelatihan (*for Trainee and Trainer*), Teknologi (*Technical Assistance*), Seminar/*Workshop*, dan Kunjungan Kerja (*Working Visit*) (Atmawinata, et al., 2008).

Kegiatan-kegiatan yang disediakan oleh MIDEDEC di atas merupakan upaya untuk melakukan transfer ilmu dan pendanaan kepada 13 sektor industri yang telah disepakati. Dalam pelaksanaannya, kerja sama MIDEDEC melakukan pembagian terhadap 13 sektor tersebut menjadi dua sektor, yaitu:

1. Lintas Sektoral (*Cross Sectoral*): *Metal Working, Welding, Mold & Dies, Energy Conservation, Export & Investment Promotion, dan SMEs (Small-and Medium-scale Enterprises)*.
2. Sektor spesifik (*Specific Sectoral*): *Automotive, Electronics, Steel, Textile, Petro & Oleo Chemicals, Non Ferrous, dan Food and Beverages*.

Penelitian ini difokuskan terhadap sektor baja (*Steel*). Pada skema MIDEDEC, sektor baja merupakan salah satu sektor industri yang termasuk dalam kelompok sektor spesifik. Sektor baja memegang peranan penting dalam meningkatkan pembangunan konstruksi-infrastruktur, manufaktur, dan pertahanan di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia berharap dengan adanya implementasi MIDEDEC dalam kerja sama antara Indonesia dan Jepang ini dapat memberikan dampak positif terhadap pengembangan kapasitas industri baja di Indonesia.

MIDEDEC menyediakan program khusus untuk sektor baja sebagai realisasi *capacity building* di mana program tersebut bertujuan untuk mendukung pengembangan kemampuan industri baja di Indonesia supaya dapat menghasilkan produk baja yang memenuhi persyaratan industri otomotif, elektronik, dan alat berat. Selain itu, implementasi program MIDEDEC pada sektor baja ini juga difokuskan untuk meningkatkan tindakan konservasi energi dan produk bersih di industri baja karena menggunakan energi dan menghasilkan emisi gas CO₂ dalam jumlah besar. Rencana program tersebut meliputi *Basic Study, Technical Assistance, Training, dan Workshop* (Atmawinata, et al., 2008).

Sektor baja merupakan salah satu sektor yang penting dalam pelaksanaan kegiatan MIDEDEC karena memiliki keterkaitan dengan sektor-sektor industri lainnya. Namun, karena produk yang dihasilkan dari industri baja tidak memiliki daya saing yang tinggi maka diperlukan adanya program *capacity building* melalui MIDEDEC dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing produk baja untuk bisa dapat bersaing di pasar internasional terutama pasar Jepang. Hal ini juga berdasarkan dengan visi yang terdapat dalam Peraturan Presiden Indonesia no. 28 tahun 2008 terkait KIN (Kebijakan Industri Nasional) yang menjelaskan bahwa pada tahun 2025 industri Indonesia diharapkan dapat membawa Indonesia menjadi negara industri tangguh di dunia yang bertumpu pada tiga sektor industri yaitu industri agro, industri alat angkut, dan industri telematika yang di mana berdasarkan hal tersebut akan menjadikan industri baja sebagai tulang punggung pembangunan industri Indonesia (Atmawinata, et al., 2010)

Setelah beberapa tahun implementasi MIDEK berikut dengan programnya berjalan, kerja sama IJEPa ternyata belum bisa memberikan manfaat yang signifikan seperti yang diharapkan oleh pemerintah Indonesia. Padahal dengan adanya kehadiran MIDEK melalui kerja sama IJEPa ini seharusnya Indonesia dapat meningkatkan potensi sektor bajanya, namun ternyata dalam implementasinya Jepang tidak benar-benar serius memberikan bantuan sesuai dengan *term of reference* yang telah disepakati sebelumnya. Pasalnya, dari 13 sektor yang digarap hanya lima sektor yang implementasinya dinilai cukup baik yakni *Welding, Mold & Dies, Automotive, Electronics, dan Energy Conservation* (Kemenperin, 2013) dan dalam sektor baja sendiri terdapat penundaan implementasi program serta dari tiga program yang direncanakan hanya satu yang benar-benar memberikan hasil (Atmawinata, et al., 2008). Maka dari itu, penulis tertarik melakukan penelitian ini untuk dapat mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan tidak optimalnya kerja sama IJEPa melalui skema MIDEK pada sektor baja yang hanya dinilai berhasil menyelesaikan satu dari tiga program yang direncanakan.

Dalam melakukan penelitian ini, penulis melakukan tinjauan pustaka terkait penelitian-penelitian terdahulu sesuai dengan topik dan pembahasan yang penulis angkat, dan dengan harapan penelitian-penelitian terdahulu dapat membantu penulis dalam membuat kajian literatur serta dapat penulis jadikan referensi dalam melakukan penelitian. Pertama, terdapat penelitian yang menjelaskan bahwa terdapat perubahan positif yang terjadi dalam perdagangan bilateral Indonesia dan Jepang setelah kesepakatan IJEPa direalisasikan. Selain itu, terdapat hasil analisis yang dilakukan dengan menggunakan metode *counterfactual* yang menunjukkan bahwa terdapat peningkatan ekspor non migas Indonesia ke Jepang, sedangkan pada impor non migas Indonesia dari Jepang tidak mengalami perbedaan sebelum dan setelah adanya IJEPa (Ardiyanti, 2015). Untuk itu, penulis berasumsi bahwa seharusnya kesepakatan IJEPa juga dapat berpengaruh positif pada sektor industri manufaktur di Indonesia. Literatur kedua menjelaskan bahwa kehadiran IJEPa yang berlandaskan liberalisasi

perdagangan memberikan dampak tersendiri bagi Indonesia dan Jepang. Melalui IJEPA, Indonesia dan Jepang sepakat melakukan kebijakan penurunan tarif dan keterbukaan pasar karena kebijakan-kebijakan tersebut dinilai memiliki kontribusi besar dalam skema perdagangan internasional. Hal ini dibuktikan dari meningkatnya pendapatan nasional Indonesia yang naik 1,58 kali lipat dan pendapatan nasional Jepang yang naik 1,01 kali lipat dibandingkan tanpa skema IJEPA (Setiawan, 2012).

Selanjutnya, penelitian ketiga hadir dari salah satu artikel yang berisikan penjelasan mengenai pengaruh implementasi kerja sama IJEPA terhadap perkembangan industri manufaktur di Indonesia. Dalam kerja sama IJEPA, sektor industri manufaktur Indonesia termasuk sektor yang diprioritaskan karena industri manufaktur Indonesia memiliki skala yang bervariasi dan memiliki karakteristik yang padat karya. Hal ini terlihat dari adanya fasilitas khusus yang diberikan IJEPA seperti program MIDEK yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing dan menghasilkan produk bermutu tinggi. Selain itu IJEPA juga didasari oleh pilar liberalisasi perdagangan yang berarti juga berperan dalam meningkatkan ekonomi industri dengan menurunkan biaya produksi sehingga harga yang ditetapkan menjadi lebih kompetitif (Budiarti & Hastiadi, 2015)

Penelitian keempat ditinjau berdasarkan apa yang menjadi kepentingan Indonesia dalam melakukan kerja sama IJEPA di mana penelitian tersebut menjelaskan bahwa latar belakang terbentuknya kerja sama IJEPA merupakan bentuk realisasi dari kepentingan kedua negara yang ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Indonesia berkepentingan menjadikan Jepang sebagai negara mitra dagang dan investor utama bagi Indonesia sehingga Indonesia dapat mengoptimalkan kerja sama untuk meningkatkan nilai ekspor dan impor seperti yang diharapkan. Selain itu, Indonesia juga mengadopsi strategi kepentingan nasional yang menyepakati sektor penggerak (industri otomotif, listrik, elektronik, dan alat berat) sebagai sektor utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi di kedua negara, meningkatkan daya saing industri dengan memperluas akses pasar, dan menjadi pusat pengembangan manufaktur (Avivi & Siagian, 2020).

Literatur selanjutnya juga menjelaskan apa yang menjadi faktor atau alasan Jepang dalam memilih Indonesia sebagai negara mitra untuk melakukan kerja sama ekonomi melalui skema IJEPA. Dalam melihat motif kebijakan domestik Jepang, penelitian ini menggunakan konsep national interest, sehingga menganggap bahwa kerja sama IJEPA merupakan bentuk upaya Jepang untuk mempertahankan eksistensinya di Indonesia dan di Asia Tenggara (Islamawati & Rosyidin, 2019).

Selanjutnya, penelitian keenam merupakan salah satu penelitian yang memiliki kesamaan latar belakang dengan penulis yang menjelaskan bagaimana gambaran mengenai kerja sama ekonomi *Indonesia – Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA)* berikut dengan latar belakang, proses, dan apa saja prinsip dan elemen yang mendasarinya. Selanjutnya, penelitian ini juga membahas bagaimana perkembangan industri manufaktur di Indonesia yang telah dibekali program MIDEDEC terutama dalam peningkatan daya saing industri di sektor tekstil (Maidangkay, 2020). Berdasarkan karya ilmiah tersebut, yang menjadi pembeda pada penelitian ini terdapat pada objek penelitian penulis yang lebih rinci membahas industri manufaktur dalam sektor baja.

Lebih lanjut terkait relevansi IJEPA dan MIDEDEC, penelitian ketujuh berisi penjelasan mengenai penjelasan tentang apa saja faktor-faktor yang mengakibatkan implementasi IJEPA tidak berjalan semestinya di mana salah satu faktor tersebut adalah tidak efektifnya program *Manufacturing Industry Development Center (MIDEDEC)* dalam pengembangan nilai kapasitas sektor industri di Indonesia sehingga Indonesia tidak dapat memperoleh keuntungan dari kerja sama IJEPA dalam sektor *capacity building* yang telah disepakati sebelumnya (Kambey, 2016).

Selanjutnya, penelitian kedelapan membahas mengenai keterkaitan antara *User Specific Duty Free Scheme* dan *Manufacturing Industrial Development Center Programs*, di mana keduanya merupakan sebuah realisasi dalam kerja sama IJEPA. Selain membahas tentang pengertian dan keterkaitannya, dalam penelitian tersebut juga dibahas mengenai program apa saja yang telah direalisasikan dari kerja sama tersebut dan

mengevaluasikannya. Hasil evaluasi pada penelitian tersebut menunjukkan selama periode 2008-2012, program MIDEDEC sendiri memiliki lima sektor yang dinilai terbaik dari tiga belas sektor yang ada, yaitu 1) *Welding*, 2) *Mold & Dies*, 3) Otomotif, 4) Elektronik, dan 5) SMEs (Mursitama, Noerlina, & Sabrina, 2019).

Kemudian terdapat beberapa penelitian yang dapat dijadikan sebagai pembandingan kerja sama IJEPA, yaitu literatur yang berisikan evaluasi mengenai perkembangan kerja sama *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* (IJEPA) dan *Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement* (IPPTA) dengan menjelaskan sejauh mana kedua kerja sama tersebut memberikan manfaat bagi Indonesia melalui kegiatan ekspor impor Indonesia ke Jepang dan Pakistan. Selanjutnya, penelitian ini juga memberikan hasil bahwa Indonesia belum bisa optimal dalam memanfaatkan IJEPA tidak seperti IPPTA yang lebih menguntungkan Indonesia dibandingkan Pakistan pasalnya IPPTA hanya meliberalisasi pos tarif tertentu yang menjadi prioritas dalam perdagangan bilateral Indonesia dan Pakistan (Ningsih, Falianti, & Budiarti, 2018). Literatur selanjutnya berisikan penjelasan mengenai peluang, tantangan, dan strategi dari kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan di bidang manufaktur. Peluang yang terlihat dari kerja sama ini berkaitan dengan faktor-faktor dari kedua negara yang dapat meningkatkan kerja sama tersebut di masa depan, seperti Indonesia yang kaya akan sumber daya alam dan Korea Selatan yang memiliki modal dan teknologi yang canggih serta memadai, sehingga kerja sama tersebut bisa memperluas lapangan pekerjaan dan menyerap tenaga kerja. Selanjutnya, tantangan yang menghambat implementasi kerja sama ini terdapat pada perselisihan yang terjadi antara para buruh di Indonesia dengan para pengusaha di Korea Selatan dan strategi yang digunakan untuk mengatasi perselisihan tersebut adalah dengan membentuk kemitraan strategis bernama *Indonesia – Korea Joint Task Force on Economic Cooperation* (JTF-EC) yang bertugas untuk mengakomodasi perkembangan kedua negara (Syahrief, 2016).

Penelitian-penelitian yang telah dijelaskan di atas dimaksudkan untuk menjadi acuan bahwa penelitian-penelitian sebelumnya berbeda dengan penelitian penulis. Penelitian-penelitian di atas telah membahas kerja sama IJEPa dan program MIDEc namun belum ada yang membahas secara rinci bagaimana pengaruhnya terhadap sektor baja. Oleh karena itu, penelitian ini akan membahas tentang bagaimana implementasi program MIDEc dalam kerja sama IJEPa pada sektor baja pada tahun 2008-2013.

1.2 Rumusan Masalah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menganalisis bagaimana implementasi program MIDEc terhadap sektor industri baja dalam kerja sama IJEPa. Industri baja sendiri merupakan salah satu bagian dari industri manufaktur yang memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Namun, selama program MIDEc berjalan, sektor industri baja tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan karena terdapat implementasi kegiatan yang tidak berjalan sesuai dengan *term of reference* yang telah disepakati sebelumnya. Berangkat dari permasalahan tersebut, maka muncul rumusan masalah yang tepat untuk mengkaji penelitian ini yaitu "**Mengapa implementasi MIDEc pada sektor industri baja dalam kerja sama IJEPa tidak dapat berjalan secara optimal pada tahun 2008-2013?**"

1.3 Tujuan Penelitian

Mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kerja sama IJEPa dalam skema MIDEc pada sektor baja belum berjalan secara optimal.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan bagi para akademisi hubungan internasional dan dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya terkait kerja sama bilateral yang menggunakan

konsep EPA (*Economic Partnership Agreement*) khususnya terkait dengan kerja sama industri.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu bahan informasi baru yang dapat dipelajari oleh para praktisi pengambil kebijakan yang berperan dalam pengembangan kapasitas industri baja di Indonesia. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber informasi dalam lingkup hubungan internasional terutama dalam kerja sama bilateral antara Indonesia dan Jepang pada industri manufaktur di sektor baja.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian, maka penelitian ini akan dibagi menjadi lima bab, di mana setiap bab terdiri dari bab dan sub-bab. Adapun sistematik penulisan ini adalah sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab pertama merupakan bab pembuka dari penelitian ini dan penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab kedua penulis akan membahas mengenai konsep dan teori penelitian sesuai dengan topik yang diambil untuk mempersiapkan jawaban-jawaban dari rumusan masalah penelitian. Selain itu, penulis juga akan menyertakan alur pemikiran dan asumsi dasar yang digunakan sebagai gambaran umum dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ketiga penulis akan memberikan penjelasan tentang objek yang akan diteliti, jenis penelitian yang akan digunakan, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, dan tabel rencana watu terkait dengan penelitian ini

BAB IV KERJA SAMA INDUSTRI MANUFAKTUR INDONESIA -- JEPANG DALAM MIDECA (MANUFACTURING INDUSTRY DEVELOPMENT CENTER)

Pada bab keempat berisi penjelasan mengenai profil dari MIDEDEC (*Manufacturing Industry Development Center*) beserta dengan program-program di dalamnya dan menyinggung kerja sama IJEPA (*Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*) secara umum.

BAB V REALISASI KERJA SAMA INDONESIA — JEPANG DALAM SKEMA MIDEDEC PADA SEKTOR BAJA (*STEEL*) PERIODE 2008-2013

Pada bab kelima berisi kerja sama Indonesia dan Jepang dalam pengimplementasian program MIDEDEC terhadap sektor baja selama periode 2008-2013. Bab ini juga akan membahas hambatan dan hasil yang diperoleh dari implementasi MIDEDEC tersebut terhadap industri manufaktur terutama sektor baja

BAB VI PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dari hasil penelitian ini yang berisikan kesimpulan penelitian dan menjadi jawaban pokok dari permasalahan penelitian mengenai implementasi MIDEDEC terhadap sektor baja di Indonesia periode 2008- 2013.